

Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Manifestasi Wujudkan Masyarakat Maju dan Berdaya Saing



BUPATI Iti Octavia Jayabaya tandatangani Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Perda Kabupaten Lebak Tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Lebak di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (1/11/2023).

Dalam pendapat akhirnya Bupati Lebak menegaskan bahwa proses perencanaan penganggaran di Kabupaten Lebak senantiasa berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan telah dikawal dengan baik melalui aplikasi SIPD-RI Kemendagri yang terintegrasi guna memastikan tiap tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan akuntansi pelaporan berjalan sebagaimana seharusnya tanpa intervensi kepentingan tertentu mulai dari Musrenbang Desa hingga penyusunan APBD, hal ini dilakukan untuk memastikan terwujudnya sinergitas tahapan perencanaan dan penganggaran.

"Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami penyesuaian pada pendapatan

transfer seiring dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal penyampaian rincian alokasi transfer daerah tahun anggaran 2024," kata Bupati Iti.

Ia menambahkan, pemanfaatan SILPA Unaudited Tahun 2023 menjadi upaya yang ditempuh oleh tim anggaran Pemerintah Daerah untuk menyeimbangkan postur APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024 dengan tetap mendorong belanja daerah pada pencapaian capaian target

“Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah hal yang wajar, dan aspirasi dari mahasiswa tersebut haruslah didengar. Isu-isu dan program strategis bagaimana bisa di-carry over ke program perencanaan berikutnya bisa tercapai. Tidak ada yang meninggalkan sisa walaupun sedikit

prioritas nasional, percepatan transformasi ekonomi seperti penanganan penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting, pengendalian inflasi penguatan Sumber Daya Manusia dan pembangunan infrastruktur.

“Dengan telah ditandatanganinya berita acara persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD Kabupaten Lebak mengenai Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 maka kami akan segera menyampaikan kepada Gubernur Banten untuk dievaluasi. Harapan kami hasil evaluasi Gubernur dapat diterbitkan tepat waktu sehingga diharapkan



seluruh rangkaian proses penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dapat ditetapkan sesuai dengan jadwal yang disepakati,” tandasnya.

Menutup sambutannya itu mengajak kepada pimpinan dan anggota DPRD yang untuk bersama-sama melakukan optimalisasi penggunaan anggaran dengan sebaik-baiknya dan meminta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya agar dapat mengelola anggaran secara lebih cermat, transparan, dan akuntabel serta segera menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga pelak-

sanaan APBD TA 2024 dapat dilaksanakan tepat waktu.

Sementara itu, Kepala BKAD Lebak Halson Nainggolan mengatakan, struktur APBD Lebak tahun 2024 sebesar Rp 3,045 triliun.

“Struktur APBD 2024 yang disetujui kepala daerah dengan DPRD Lebak berimbang di Rp3,045 Triliun,” kata mantan Inspektur Inspektorat Lebak ini.

Dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2024, arah kebijakan pembangunan daerah yakni pemantapan daya saing daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik menuju kemandirian ekonomi.

“Ini manifestasi dari cita-cita Pemkab Lebak untuk mewujudkan masyarakat lebih maju dan berdaya saing. Pemkab Lebak terus meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal,” pungkasnya. (*)

